

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Yarry Septia Larasati, Dadang Sadeli, Surtikanti  
Magister Akuntansi Universitas Pancasila  
E-mail: [y4rry\\_s@yahoo.co.id](mailto:y4rry_s@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*The aim of this study is to obtain empirical data about the influence of internal control role, whistleblowing system, and good governance both partially and simultaneously to the prevention of fraud. This research involving 53 respondents in the scope of Directorate General of Marine Spatial Management Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia. This research apply a survey by questionnaire as research instrument while methods used to process and analyze data on research are descriptive analysis and analysis of multiple regression. The results show that internal control role, whistleblowing system, and good governance have significant effects against fraud prevention partially, with count  $t$  larger than  $t$  table and positive value of regression. Furthermore, internal control role, whistleblowing system and good governance effect simultaneously to the prevention of fraud with the count  $f$  larger than  $f$  table. From this study, it can be concluded that internal control role, whistleblowing system and good governance whether partially and simultaneously effect prevention of fraud.*

*Keywords: Internal Control, Whistleblowing System, Good Governance, Prevention of Fraud*

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan perekonomian di dunia tidak hanya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga diiringi dengan semakin berkembangnya *fraud* atau biasa dikenal dengan istilah kecurangan. Seperti halnya di Amerika Serikat, kasus Enron menjadi contoh manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan sebesar US\$600 juta, sedangkan pada saat itu Enron mengalami kerugian. Selain itu terdapat juga kasus WorldCom, Global Crossing dan Adelphia yang jatuh akibat skandal kecurangan (*fraud*) dalam bentuk pencurian aset, kejahatan komputer, korupsi maupun manipulasi pelaporan keuangan (Yenny, 2014). Begitu juga di Indonesia, pada tahun 2001 tercatat skandal keuangan di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma memanipulasi laporan keuangan dengan cara melaporkan adanya laba bersih sebesar

Rp132 milyar padahal seharusnya hanya sebesar Rp99,56 milyar, atau lebih rendah sebesar Rp32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan (Kencana, Rizki Wastu. Kasus Kimia Farma. Kompasiana, 2012. Web. 20 Januari 2016. <http://kompasiana.com/kasus-kimia-farma-etika-bisnis>).

Menurut *Indonesia Procurement Watch* (IPW), dari 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persen diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Pengadaan oleh pemerintah yang dilakukan secara konvensional dinilai masih memiliki tiga kelemahan, yaitu: transparansi, inefisiensi, dan ketidaksesuaian fungsi pengadaan (LKPP, 2010:19). Hal ini membuktikan bahwa terdapat kesalahan dan adanya konflik kepentingan dalam suatu organisasi.

Upaya pencegahan *fraud* nampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate*

*governance* dan lain-lain. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh beberapa pihak yang mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan seperti dewan direksi, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk menyediakan jaminan memadai mengenai prestasi dari sasaran kinerja dalam (1) efektivitas dan efisiensi operasional (2) keandalan pelaporan keuangan dan (3) pemenuhan dari ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan regulasi (IAPI,2011:319). Pengendalian internal berperan penting dalam mencegah terjadinya dan mendeteksi *fraud* serta untuk melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jika pengendalian internal dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik maka pengendalian internal dapat diandalkan dalam melindungi diri dari *fraud*.

*Fraud* juga dapat dicegah dengan adanya *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Indonesia, sebagai negara di Benua Asia merupakan negara dengan budaya kolektif yaitu kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi. Kondisi budaya yang seperti itu, menjadikan *whistleblower system* menjadi lebih sulit diterapkan di Indonesia. Padahal *whistleblowing system* yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Sehingga

dengan adanya *whistleblowing system* ini maka lebih dapat meningkatkan kejujuran dan keterbukaan.

Selain itu *good corporate governance* nampaknya juga berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*. Praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadi *fraud* yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan. *Corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau *shareholder*) (Jackson, 2009). Badan pengelola pasar modal di banyak negara menyatakan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan publik secara baik telah berhasil mencegah praktik kecurangan atas laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Sutoyo dan Aldridge, 2005). *Fraud* juga dapat dicegah jika suatu organisasi memiliki adanya budaya etis. Budaya etis organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi. Tingkah laku merupakan suatu tingkah laku yang dapat diterima oleh moral dan benar secara hukum. Di dalam suatu budaya organisasi yang etis terdapat adanya suatu komitmen dan lingkungan yang etis pula (Pristiyanti, 2012). Jika suatu organisasi mempunyai budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik budaya etis organisasi suatu instansi akan semakin rendah kecenderungan karyawan melakukan *fraud* atau kecurangan.

Berdasarkan uraian masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam suatu perusahaan meskipun perusahaan tersebut telah memiliki standar dan peraturan, banyak perusahaan yang belum menerapkan konsep *corporate governance* sehingga perusahaan tersebut

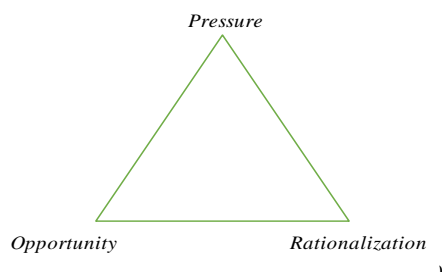
tidak berjalan sesuai dengan harapan para *stakeholder*. Masih rendahnya moral yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan sosial menyebabkan banyak terjadi perilaku yang menyimpang seperti praktik-praktik yang koruptif. Di sisi lain mayoritas masyarakat bersikap tidak peduli bahkan mendukung *fraud* karena ketidakpedulian tersebut muncul pada tindakan negosiasi dengan memberikan sejumlah imbalan tertentu.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis tentang seberapa besar pengaruh peran pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dan menganalisis tentang seberapa besar pengaruh peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance* secara simultan terhadap pencegahan *fraud*.

## KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### Teori *Fraud Triangle*

*Fraud triangle* adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey setelah melakukan penelitian untuk tesis doktornya pada tahun 1950. Cressey mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu masalah keuangan yang harus dirahasiakan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan *fraud*, dan rasionalisasi (*rationalization*) dari pelaku.



Gambar 1. *Fraud Triangle*

Sumber: Tuanakotta (2010)

Menurut Tuanakotta (2010: 207-214) faktor seseorang melakukan kecurangan disebabkan oleh:

1. Tekanan (*pressure*)
2. Kesempatan (*opportunity*)
3. Pembenaran (*rationalization*).

### Teori *GONE*

Menurut Jack Bologne (Simanjuntak 2008: 122), terdapat empat faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan, yang disebut dengan teori *GONE*, yaitu:

- a. *Greed* (keserakahan)
- b. *Opportunity* (kesempatan)
- c. *Need* (kebutuhan)
- d. *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut faktor individual). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat dari individu itu sendiri. Faktor individu ini berhubungan dengan moralitas untuk melakukan kecurangan. Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut faktor generik/umum).

### Akuntansi Forensik

Definisi akuntansi forensik menurut Hopwood *et al.* (2008: 3) yaitu:

*“forensic accounting is the application of investigative and analytical skills for the purpose of resolving financial issues in a manner that meets standards required by courts of law.”*

Akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan dan hukum. Sedangkan menurut Tuanakotta (2010: 4) akuntansi forensik adalah penerapan sistem akuntansi dalam

bidang hukum terutama pada permasalahan kecurangan atau *fraud*.

Akuntansi forensik adalah aplikasi ilmu akuntansi yang bermanfaat dalam penyelesaian dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian diperlukan akuntan forensik yang mempunyai keahlian dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak (Hartanti, 2005: 9). Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam kejahatan *white collar crime*. Korupsi juga diartikan sebagai penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi.

### **Pengendalian Internal**

Menurut Tunggal (2010: 195) pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut: (a) Keandalan pelaporan keuangan (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Krismiaji (2010: 218) pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu cara sistematis yang dijalankan oleh seluruh pegawai dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk melindungi aktiva dan memberikan informasi yang akurat dan memadai dalam mencapai tujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Menurut Tunggal (2010: 196) ada lima

komponen pengendalian yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal (*Control environment*)
2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)
3. Aktivitas pengendalian (*Control activities*)
4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

### **Whistleblowing System**

Gottschalk (2011, vol 3:1) menyatakan *whistleblowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi (atau mantan) atas suatu praktik ilegal, tidak bermoral, atau praktik-praktik tidak sah di bawah kendali pemberi kerja mereka, kepada orang-orang atau organisasi yang mungkin dapat memengaruhi tindakan. Jadi dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* adalah pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai informasi atau praktik-praktik ilegal yang melanggar peraturan dan hukum. Di dalam Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2008: 9), sistem *whistleblowing* terdiri dari tiga aspek, yaitu:

- a) Aspek struktural
- b) Aspek operasional
- c) Aspek perawatan

### **Good Corporate Governance**

Sutedi (2011: 1) mengemukakan pengertian *good corporate governance* secara definitif adalah: "Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*". Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2006: 5) ada lima aspek dalam prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas
4. Independensi

5. Kewajaran dan Kesetaraan

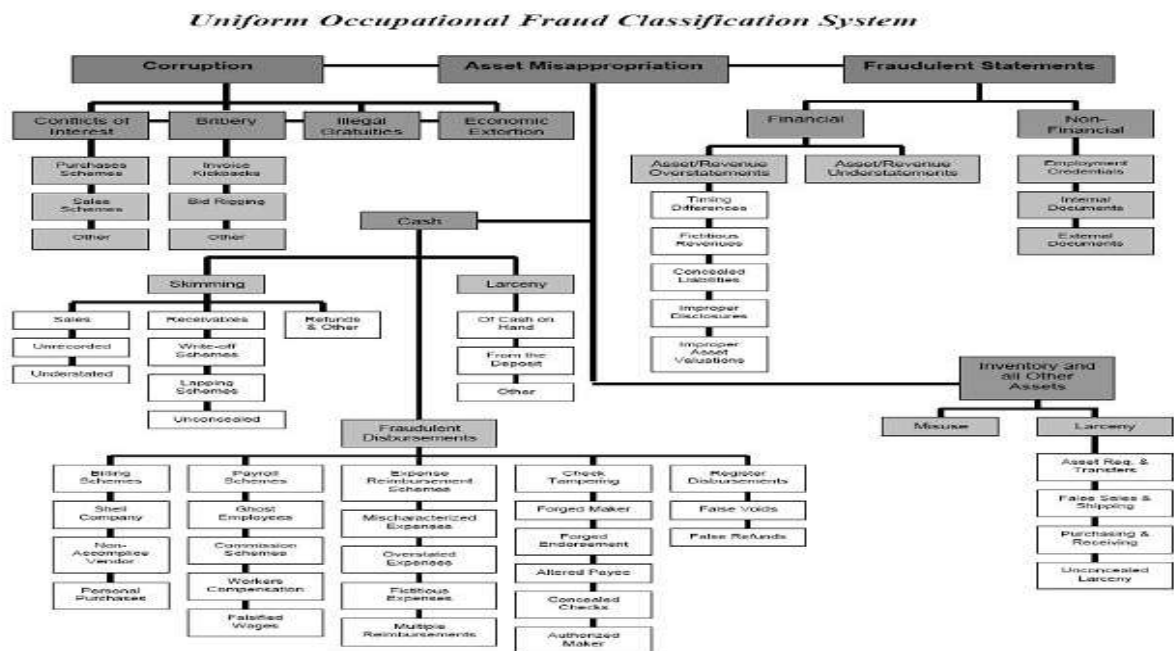
**Pencegahan Fraud**

Tunggal (2012: 2) berpendapat bahwa kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, tidak termasuk ketidaktahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah berbagai macam cara kecerdikan manusia yang direncanakan dan dilakukan secara individual maupun berkelompok yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya untuk keuntungan pribadi dan atau

keuntungan organisasi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku dengan cara menyembunyikan dalam atau melalui rekayasa yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

**Karakteristik Fraud**

*Fraud* selalu dikaitkan korupsi, padahal karakteristik atau jenis-jenis *fraud* itu sendiri banyak tidak hanya korupsi saja. ACFE dalam Tuanakotta (2010: 97) membagi *fraud* (kecurangan) menjadi tiga jenis berdasarkan perbuatan dan dikenal dengan *fraud tree*. *Occupational fraud tree* memiliki tiga cabang utama yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statement*.



Gambar 2. The Fraud Tree

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Manual, 2007

**Pencegahan Fraud**

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations-COSO* (1992) pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan

komisaris, manajemen, dan personel lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008: 37) pencegahan

*fraud* adalah upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud (fraud triangle)* yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

Pope (2007: 388) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dalam hal pengadaan barang publik, terdiri dari:

1. Memperkuat kerangka hukum.
2. Prosedur transparan.
3. Membuka dokumen tender.
4. Evaluasi penawaran.
5. Melimpahkan wewenang.
6. Pemeriksaan dan audit independen.

#### **Kerangka Pemikiran**

##### **Hubungan Pengendalian Internal dengan Pencegahan *Fraud***

Hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam perusahaan sangat erat kaitannya. Pengendalian internal dalam suatu perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Menurut Tuanakotta (2007: 162) upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian intern. Disamping pengendalian internal, dua konsep penting dalam pencegahan *fraud* yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud (fraud awareness)* dan upaya menilai resiko terjadinya *fraud (fraud risk assessment)*. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa *fraud* dapat dikurangi bahkan dicegah dengan membudayakan kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain serta menghilangkan peluang seseorang untuk melakukan *fraud* dengan menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* dan sangsi atas perbuatan tersebut.

##### **Hubungan *Whistleblowing System* dengan Pencegahan *Fraud***

Widyantari (2013) menyatakan bahwa efektivitas sistem *whistleblowing* membantu perusahaan keluar dari kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dan membantu perusahaan agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan perusahaan dengan cara yang bersih. Pendapat Priantara (2013) menyebutkan bahwa salah satu sistem yang digunakan dalam mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan menerapkan sistem pelaporan dugaan *fraud (whistleblower hotlines)*. Di Amerika sistem *whistleblower hotlines* ini diwajibkan karena menurut berbagai survei di sana, sistem ini menjadi alat yang paling utama untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan karena calon pelaku pastinya akan merasa takut bila diadukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irvandly (2014) menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Kemudian besar pengaruh penerapan *whistleblowing system* dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan adalah sebesar 16,3%. Jadi semakin baik penerapan *whistleblowing system* di dalam perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan. Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* dapat mencegah terjadinya *fraud* karena sistem ini dapat dengan cepat mendeteksi adanya *fraud* sehingga dapat langsung ditindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh *whistleblower*.

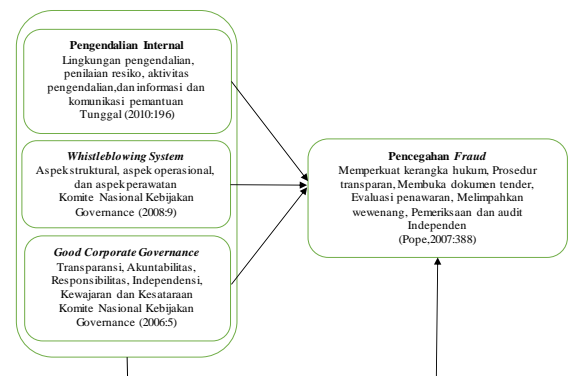
##### **Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Pencegahan *Fraud***

Struktur *corporate governance* mengenal dua mekanisme tata kelola yaitu tata kelola internal dan tata kelola eksternal. Masing-masing tata kelola internal dan eksternal mempunyai elemen-elemen yang kalau semua elemen tata kelola eksternal dan

internal tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka *fraud* dapat dicegah atau dikurangi.

Menurut Gusnardi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit, pengendalian internal, audit internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan perusahaan. Beawiharta (2014) juga mengatakan bahwa implementasi *good government governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan karena semakin tinggi implementasi *good government governance*, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Menurut Aprijana (2014) bahwa dengan menerapkan *good governance* dan meningkatkan keahlian yang lebih profesional dalam pengawasan dan pemeriksaan mengenai penyajian laporan keuangan, maka akan mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan serta menciptakan keberhasilan tujuan organisasi. Dengan tercapainya tujuan organisasi, maka terbuka menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga akan memberikan dampak positif bagi tujuan kesejahteraan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *good corporate governannce* dapat mencegah atau mengurangi *fraud* sehingga perlu adanya pemahaman tentang struktur, mekanisme, prinsip dan fungsi *corporate governance* yang harus dijalankan secara bersamaan. Penjelasan mengenai pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, peran *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dapat dilihat melalui paradigma penelitian berikut ini.



Gambar 3. Paradigma Penelitian

### Pengembangan Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, maka disusun beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

H2: *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

H3: *Good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

H4: Pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

### METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kausatif, Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner kepada responden. Jenis pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran ordinal. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban dalam menguji variabel independen yaitu lima tingkatan.

Tabel 1. Skor Skala Likert

Skor	Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

**Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Kuesioner No	Skala
Pengendalian Internal (X1)	Tunggal(2010:195) Suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :(a) Keandalan pelaporan keuangan (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum.	Tunggal(2010:196) • Lingkungan pengendalian, • Penilaian resiko, • Aktivitas pengendalian, • Informasi dan komunikasi, • Pemantauan	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12,13,14 15,16 17,18,19 20,21	Ordinal
Whistleblowing System (X2)	Elias(2008:283) Pelaporan oleh anggota dari suatu organisasi (sekarang atau terdahulu) terhadap praktek ilegal, imoral, dan haram yang berada dibawah kontrol karyawan terhadap orang atau organisasi yang mungkin dapat mengakibatkan suatu tindakan.	KNKKG(2008:9) • Aspek struktural, • Aspek operasional, • Aspek perawatan	22,23,24,25,26,27 28,29,30 31,32,33	Ordinal
Good Corporate Governance (X3)	Sutedi(2011:1) Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder.	KNKKG(2006:5) • Transparansi • Akuntabilitas • Responsibilitas • Independensi • Kewajaran dan Kesetaraan	34,35,36 37 38 39 40	Ordinal
Pencegahan Fraud (Y)	Tuanakotta(2007:168) <i>A system of "special purpose" processes and procedures designed and practiced for the primary if not sole purpose of preventing or deterring fraud</i>	Pope(2007:388) • Memperkuat kerangka hukum • Prosedur transparan • Membuka dokumen tender • Evaluasi penawaran • Melimpahkan Wewenang • Pemeriksaan dan audit Independen	41,42 43,44,45 46 47 48 49	Ordinal

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang sudah dirumuskan sebelumnya untuk responden memberikan jawaban mereka. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Reserach*)
  - a. Metode Wawancara
  - b. Metode Angket/Kuesioner
2. Studi Pustaka

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel terdiri dari anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE ) yang berjumlah 53 orang.

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas adalah untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor totalnya. Koefisien korelasi item-total dengan *bivariate pearson* dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut:

$$r_{ix} = \frac{n\sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{n\sum i^2 - (\sum i)^2} \sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2}}$$

Keterangan:

- r<sub>ix</sub> = Koefisien korelasi item-total (*bivariate pearson*)
- i = Skor item
- x = Skor total



$n$  = Banyaknya subyek

Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap total skor, sehingga dinyatakan valid. Jika  $r$  hitung  $< r$  tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap total skor, maka dinyatakan tidak valid.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Untuk uji reliabilitas ini akan digunakan metode *alpha cronbach*. Menurut Gendro (2011: 126), suatu instrumen dikatakan handal bila memiliki koefisien cronbach alpha lebih dari 0,60.

$$r = \alpha = \left( \frac{N}{N-1} \right) \left( \frac{S^2 - \sum S_i^2}{S^2} \right)$$

Keterangan:

$r = \alpha$  = Reliabilitas internal seluruh instrumen

$N$  = Jumlah item kuesioner

$S^2$  = Varian dari total skor variabel

$S_i^2$  = Varian dari skor item ke-i

### Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dirumuskan:

$$Y = aB^1X^1 + B^2X^2 + B^3X^3 + \varepsilon$$

Keterangan:

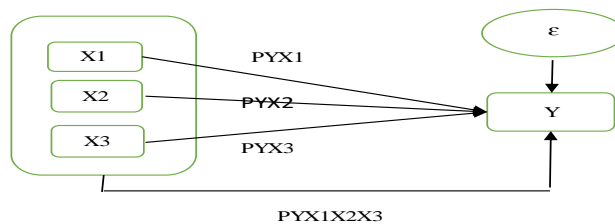
$Y$  = Pencegahan *Fraud*

$X_1$  = Pengendalian Internal

$X_2$  = *Whistleblowing System*

$X_3$  = *Good Corporate Governance*

$\varepsilon$  = Variabel lain yang tidak diteliti tapi berpengaruh (contoh: Peran Audit Internal dan Budaya Etis)



Gambar 4. Desain Penelitian

Keterangan:

$PYX_1$  = Variabel  $X_1$  berpengaruh parsial terhadap variabel  $Y$

$PYX_2$  = Variabel  $X_2$  berpengaruh parsial terhadap variabel  $Y$

$PYX_3$  = Variabel  $X_3$  berpengaruh parsial terhadap variabel  $Y$

$PYX_1X_2X_3$  = Variabel  $X_1X_2X_3$  berpengaruh simultan terhadap variabel  $Y$

$\varepsilon$  = Variabel lain yang tidak diteliti tapi berpengaruh (contoh: Peran Audit Internal dan Budaya Etis)

### Pengujian Hipotesis

#### Uji $t$ , Uji $F$ , dan Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan

0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara parsial variabel pengendalian internal, *whistleblowing system*, moralitas, dan peran sistem *e-proc* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau secara parsial variabel pengendalian internal, *whistleblowing system*, moralitas, dan peran sistem *e-proc* tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Jika  $t$  penelitian  $>$   $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

Jika  $t$  penelitian  $<$   $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Rumus Uji F seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003: 47) sebagai berikut:

$$\frac{R^2 (N-m-1)}{m (1-R^2)}$$

Keterangan:

$N$  = banyak sampel

$m$  = banyak prediktor

$R$  = koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor.

Uji determinasi ( $R^2$ ). Pengujian  $R^2$  digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Apabila  $R^2$  sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila  $R^2$  semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhadap variabel dependen. Apabila  $R^2$  semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian

Butir Pernyataan	Pengendalian internal	<i>Whistleblowing system</i>	<i>Good governance</i>	Pencegahan fraud
Item 1	0,342	0,554	0,747	0,660
Item 2	0,420	0,674	0,742	0,783
Item 3	0,485	0,352	0,747	0,740
Item 4	0,504	0,567	0,485	0,600
Item 5	0,443	0,732	0,662	0,666
Item 6	0,390	0,519	0,423	0,808
Item 7	0,450	0,315	0,376	0,780
Item 8	0,751	0,556		0,431
Item 9	0,610	0,682		0,449
Item 10	0,660	0,789		
Item 11	0,539	0,475		
Item 12	0,595	0,619		
Item 13	0,656			
Item 14	0,662			
Item 15	0,588			
Item 16	0,477			
Item 17	0,635			
Item 18	0,599			
Item 19	0,595			
Item 20	0,553			
Item 21	0,570			

Sumber: Lampiran Output Uji Validitas & Reliabilitas

Pada Tabel 3. dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (indeks validitas) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0,30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk keempat variabel penelitian valid dan layak sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Pengendalian internal	0,912	reliabel
Whistleblowing system	0,866	reliabel
Good governance	0,827	reliabel
Pencegahan fraud	0,879	reliabel

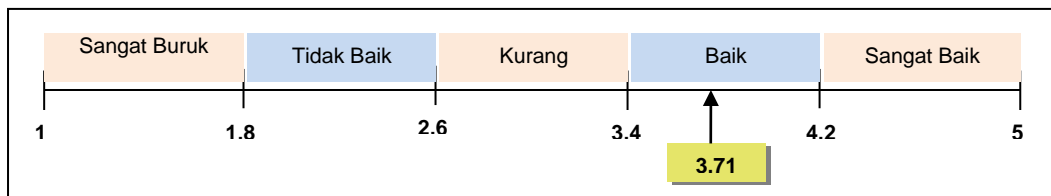
Sumber: Lampiran Output Uji Validitas & Reliabilitas

Pada Tabel 4. di atas dapat dilihat nilai koefisien reliabilitas kuesioner keempat

variabel penelitian lebih besar dari nilai kritis 0,70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan untuk masing-masing variabel sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur keempat variabel sudah memberikan hasil yang konsisten.

**Analisis Deskriptif Variabel Pengendalian Internal**

Grand mean skor jawaban responden mengenai pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **3,71** berada pada interval kategori “**Baik**” seperti ditunjukkan pada garis kontinum berikut.

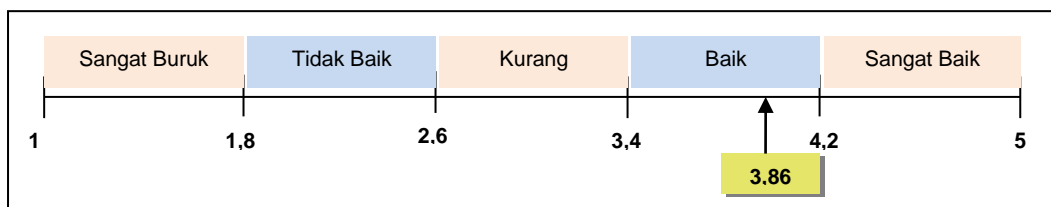


Gambar 5. Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Pengendalian Internal

**Analisis Deskriptif Variabel Whistleblowing System**

Grand mean skor jawaban responden mengenai penerapan *whistleblowing system* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang

Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **3,86** berada pada interval kategori “**Baik**” seperti ditunjukkan pada garis kontinum berikut.



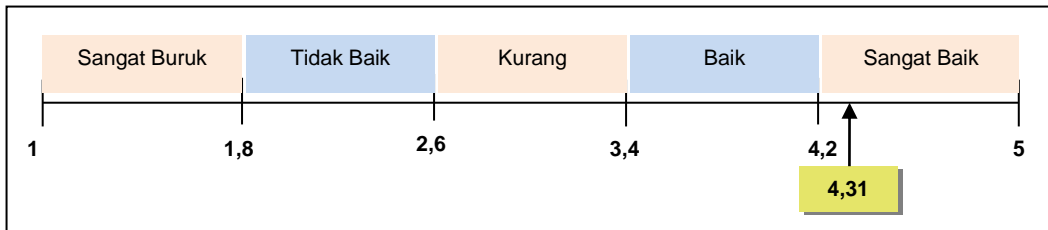
Gambar 6. Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Whistleblowing System

**Analisis Deskriptif Variabel Good Governance**

Grand mean skor jawaban responden mengenai penerapan *good governance* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **4,31** juga berada pada interval kategori

“**Sangat Baik**” seperti ditunjukkan pada garis kontinum berikut.

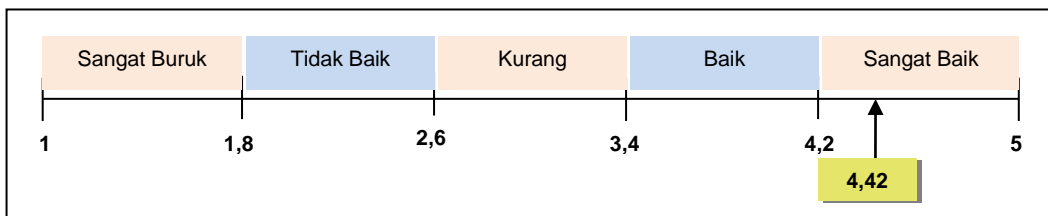


Gambar 7. Garis Kontinum Kategorisasi Variabel *Good Governance*

**Analisis Deskriptif Variabel Pencegahan Fraud**

Grand mean skor jawaban responden mengenai pencegahan fraud pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **4,42** berada pada interval kategori “**Sangat Baik**” seperti ditunjukkan pada garis kontinum berikut.



Gambar 8. Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Pencegahan Fraud

**Analisis Verifikatif Uji Asumsi Klasik**

Semua tahapan pengujian dilakukan dengan bantuan *Software SPSS IBM Statistics 20*. Dan diketahui bahwa data yang akan diuji berdistribusi normal dan tidak ada multikolinieritas sehingga layak untuk diuji.

Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N		53
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,26772411
	Absolute	,103
Most Extreme Differences	Positive	,103
	Negative	-,062
Kolmogorov-Smirnov Z		,749
Asymp. Sig. (2-tailed)		,629

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Tabel 6. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pengendalian Internal	,927	1,079
Whistleblowing System	,841	1,189
Good Governance	,854	1,171

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Berikut hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda.

Tabel 7. Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,309	,520		,593	,556
	Pengendalian Internal	,267	,090	,293	2,980	,004
	Whistleblowing System	,209	,093	,232	2,245	,029
	Good Governance	,537	,111	,497	4,856	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.29 maka dapat dibentuk model prediksi variabel pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* terhadap pencegahan fraud sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 0,309 + 0,267 X_1 + 0,209 X_2 + 0,537 X_3$$

bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal akan meningkatkan pencegahan fraud. Demikian juga koefisien *whistleblowing system* dan *good governance* bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik *whistleblowing system* maupun *good governance* akan meningkatkan pencegahan fraud.

Pada persamaan tersebut dapat dilihat koefisien pengendalian internal

#### Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,749 <sup>a</sup>	,562	,535	,27580

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Pengendalian Internal, Whistleblowing System

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Nilai R sebesar 0,749 pada tabel 4.30 menunjukkan kekuatan hubungan ketiga variabel independen (pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance*) secara simultan dengan pencegahan fraud. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel independen (pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance*) memiliki hubungan yang kuat dengan pencegahan fraud pada Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian nilai R-Square sebesar 0,562 atau 56,2 persen, menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan mampu menerangkan pencegahan fraud sebesar 56,2 persen. Artinya secara bersama-sama pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* memberikan pengaruh atau kontribusi sebesar 56,2% terhadap pencegahan *fraud* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 43,8%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar ketiga variabel independen yang diteliti seperti Budaya Etis Organisasi dan Peran Audit Internal.

### Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk menguji apakah pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* berpengaruh terhadap

pengecehan fraud, baik secara bersama-sama maupun secara parsial maka dilakukan pengujian hipotesis. Pada pengujian secara parsial apabila nilai  $t$  variabel yang sedang diuji lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya apabila nilai  $t$  variabel yang sedang diuji lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima. Pada pengujian simultan apabila ada nilai  $F$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya apabila nilai  $F$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.

Tabel 9. Ringkasan uji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud

Koefisien regresi	$t_{hitung}$	Sig.	$t_{tabel} (db:49)$	$H_0$	$H_a$
0,267	2,98	0,002	2,01	ditolak	diterima

Tabel 10. Ringkasan uji pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud

Koefisien regresi	$t_{hitung}$	Sig.	$t_{tabel} (db:49)$	$H_0$	$H_a$
0,09	2,245	0,029	2,01	ditolak	diterima

Tabel 11. Ringkasan uji pengaruh *good governance* terhadap pencegahan fraud

Koefisien regresi	$t_{hitung}$	Sig.	$t_{tabel} (db:49)$	$H_0$	$H_a$
0,537	4,856	<0,001	2,01	ditolak	diterima

Tabel 11. Tabel Pengujian Secara Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,777	3	1,592	20,936	,000 <sup>b</sup>
	Residual	3,727	49	,076		
	Total	8,505	52			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), Good Governance, Pengendalian Internal, Whistleblowing System

### Pembahasan

#### Pengaruh Peran Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Selain itu nilai koefisien regresi untuk pengendalian internal bertanda positif. Dengan demikian  $H_1$  terbukti atau diterima. Jadi dapat diartikan bahwa Pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* karena semakin baik pengendalian internal maka dapat

meningkatkan pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa salah satu faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* yakni adanya *opportunity* atau kesempatan dapat dicegah dengan adanya pengendalian internal yang baik pada suatu institusi atau organisasi.

Besarnya pengaruh peran pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* adalah 13,18% dan sisanya sebesar 86,82% dipengaruhi oleh faktor lain selain pengendalian internal seperti *whistleblowing system*, *good governance*, peran audit Internal dan budaya organisasi. Hal ini membuktikan bahwa peran pengendalian

internal tidak dominan dalam pencegahan *fraud*.

#### **Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa nilai *t* hitung variabel lebih besar dari *t* tabel. Selain itu nilai koefisien regresi untuk variabel *whistleblowing system* bertanda positif. Dengan demikian H2 terbukti atau diterima. Jadi dapat diartikan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* karena semakin baik *whistleblowing system* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* yang berasal dari faktor general yakni adanya *opportunity* atau kesempatan dan *exposure* atau pengungkapan dapat dicegah dengan adanya *whistleblowing system* yang efektif sehingga pelaku kecurangan jera dan berpikir kembali untuk melakukan kecurangan tersebut.

Besarnya pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* 11,16% dan sisanya sebesar 88,84% dipengaruhi oleh faktor selain *whistleblowing system*. Hal ini membuktikan bahwa *whistleblowing system* bukan faktor dominan dalam pencegahan *fraud* tetapi ada faktor lain yang dominan seperti *good governance*, peran audit Internal dan budaya etis organisasi.

#### **Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa nilai *t* hitung variabel lebih besar dari *t* tabel. Selain itu nilai koefisien regresi untuk variabel *good governance* bertanda positif. Dengan demikian H3 terbukti atau diterima. Jadi dapat diartikan

bahwa *good governance* berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* karena semakin baik *good governance* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab *fraud* seperti adanya *opportunity* dan *rationalization* dapat dicegah dengan adanya *good governance* yang baik karena setiap tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Besarnya pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* 31,9% dan sisanya sebesar 68,1% dipengaruhi oleh faktor lain selain *good governance* sehingga membuktikan bahwa *good governance* tidak dominan dalam pencegahan *fraud*.

#### **Pengaruh Peran Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud***

Hipotesis ke empat yang diajukan menunjukkan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS diperoleh hasil *F* hitung lebih besar dari *F* tabel, maka dapat diputuskan bahwa H4 terbukti atau diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Besar pengaruh peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* sebesar 56,2% dan sisanya sebesar 43,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori baik. 2) *Whistleblowing system* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori baik. 3) *Good corporate governance* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat baik. 4) Pencegahan *fraud* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* pada institusi ini sudah dilakukan dengan sangat baik.

Peran pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, hal ini terbukti bahwa hasil penelitian mendukung teori dan hasil penelitian juga membuktikan fenomena yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian internal maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mendukung teori dan hal ini membuktikan fenomena yang terjadi ketika *whistleblowing system* tidak berpengaruh secara dominan. Dalam penerapan *whistleblowing system* maka perlu diperhatikan peran sistem pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* sehingga akan tercipta sistem *whistleblowing* yang efektif, transparan dan bertanggungjawab. Jadi dapat diartikan bahwa semakin baik *whistleblowing system* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. *Good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mendukung teori dan hasil penelitian ini juga membuktikan fenomena yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik *good*

*governance* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semakin baik pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

### Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain : 1) Berdasarkan hasil olah data penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa sebesar 56,2% variabel independen pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen pencegahan *fraud* dan sisanya pengaruh faktor-faktor lain diluar ketiga variabel independen yang diteliti yang tidak diamati adalah sebesar 43,8% sehingga masih banyak variabel yang cukup berpengaruh tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 2) Jurnal ilmiah untuk membantu penelitian ini masih terbatas jumlahnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W.Steve, Chad O. Albrecht, 2012, *Fraud Examination and Prevention*, Thomson, South-Western: Australia.
- Amrizal, 2004, *Membangun Kultur Dan Etika Internal Organisasi Yang Anti Kecurangan*.
- Aprijana, A.A. Gede Rahadi. *Pengaruh Pemahaman Good Governance dan Keahlian Profesional terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karangasem)*. Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha



- Bastian, I, (2010), Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.
- Beawiharta, Innosanto. *Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Government Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014*. Skripsi, Universitas Telkom.
- Bologna, J, 1993, *Handbook of Corporate Fraud*, Butterworth-Heinemann: Boston.
- CBN, 2005, Skandal Sari Husada. <http://portal.cbn.net.id> diakses pada 14 Februari 2016.
- Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO), 1992, Adendum 1994, Internal Control Integrated Framework, AICPA Publication.
- COSO, 2013, Internal Control-Integrated Framework: Executive SUMMARY, Durham, North Carolina, May 2013.
- Crumbley, D. Larry, *Forensic and Investigative Accounting*, USA : 5 Agustus 2002.
- Dewi, 2015, Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 3,1 Triliun, <http://www.antikorupsi.org> diakses pada 14 Februari 2016.
- Elias, Rafik , 2008, Auditing Students' Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship To Whistleblowing", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 23, No.3, h.283-294.
- Gendro Wiyono. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0. Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN.
- Gusnardi. 2011. *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelayanan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan*. Skripsi, Universitas Riau.
- Gottschalk, Petter, 2011, Pencegahan Kejahatan Keraf Putih: Peran Akuntansi, *Journal of Forensic & Investigative Accounting* Vol. 3, Issue 1.
- Harahap, Aurolla Saparini, 2013, Fraud di Tempat Kerja, <https://manajemenppm.wordpress.com> diakses pada 14 Februari 2016.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermiyetti, 2010, Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang, *Artikel STEKPI: Jakarta* .
- Hopwood, et al. (2008). *Forensic Accounting*. New York: McGraw Hill.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), Edisi Mei 2011, Penerbit ikatan Akuntan public Indonesia: Jakarta.
- Jackson. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan oleh Jimmy Sadeli & Bayu Prawira Hie. Jakarta: Salemba, hal : 78
- James A. Hall diterjemahkan oleh Thomson Learning, 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi pertama. Salemba Empat: Jakarta.
- Kimia Farma (Etika Bisnis), 2013, <http://www.kompasiana.com> diakses pada 14 Februari 2016.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2008, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System-WBS*), Jakarta.
- Krismiaji, 2010, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2010, *Modul 1 Pelatihan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama*, Team LKPP. Jakarta.
- Pristiyanti, I. R. (2012), Persepsi Pegawai Instansi Pemerintahan Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan,

- Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Maurice E. Peloubet, "Forensic Accounting: Its place in today's economy", *Journal of Accountancy* edisi Juni 1946, h.34.
- Nawawi, Muzakky, 2012, *Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa*, <http://zqzakky.blogspot.co.id> diakses pada Februari 2016 .
- Miceli, M. P. & J. P. Near, (1985), Characteristics of Organizational Climate and Perceived Wrongdoing Associated with Whisde-Blowing Decisions, *Personnel Psychology*, 38, vol 4:1.
- Pratana, Irvandy. 2014. *Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey pada PT.Coca Cola Amatil Indnesia SO Bandung)*. Skripsi, Universitas Widyatama Bandung
- Priantara, Diaz, 2013, *Fraud Auditing & Investigation*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Pope, Jeremy, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi*: El
- Rina, 2016, *Laporan Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa*, 2015, <http://news.detik.com> diakses pada Februari 2016.
- Simanjuntak, Ridwan, 2008, *Pengertian dan Pencegahan Kecurangan*. Seri Departemen Akuntansi : FEUI.
- Singleton, Tommie, et.al, 2006, *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, John Wley and Sons, Inc: Canada.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutojo, Siswanto, Aldridge, E. John, 2005, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, Jakarta: PT. Damar Mulia Rahayu.
- Tuanakotta, Theodorus M, (2007), *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Salemba Empat: Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M, 2010, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, SALEMBA Empat: Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2010, *Teori dan Praktek Auditing*, Harvarindo: Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaya, 2010, *Dasar-Dasar Audit Internal Pedoman Untuk Auditor Baru*. Harvarindo: Jakarta.
- Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, A., 2008, *Fraud Auditing Edisi Kelima*, Pusdiklat BPKP: Jakarta.
- Sinaga, Eri Komar, 2015, *Ratu Atut Diperiksa Lagi untuk Kasus Korupsi Alat Kesehatan*, <http://www.tribunnews.com> diakses pada 14 Februari 2016.
- Widyantari, Arti. 2013. *Pengaruh Efektivitas Sistem Whistleblowing Terhadap Upaya Pengungkapan Kecurangan Manajemen Melalui Pemberian Motivasi (studi kasus pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon)*. Thesis, Universitas Pasundan.
- Yenny, 2014, *Makalah Studi Kasus Teori Akuntansi*, <http://fatmawatiyeny.blogspot.co.id> Fatmawati diakses pada 14 Februari 2016.